

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka atau dasar teori yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat, serta mengulas berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki penghasilan atau sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Alkire dan Foster (2020) menjelaskan bahwa kemiskinan absolut mencerminkan ketidakmampuan individu dalam mencapai ambang batas kebutuhan dasar minimum pendekatan ini sering digunakan dalam pengukuran kemiskinan secara global oleh lembaga-lembaga internasional. Untuk menggambarkan garis kemiskinan absolut secara matematis, digunakan persamaan:

$$Z = f(C)$$

Keterangan:

Z : garis kemiskinan absolut

C : tingkat konsumsi minimum

Model ini berfokus pada aspek kebutuhan biologis dan fisik seseorang agar dapat hidup layak, seperti kecukupan konsumsi pangan dan tempat tinggal yang memadai. Salah satu contoh penerapannya adalah ambang batas kemiskinan internasional dari Bank Dunia sebesar US\$2.15 per kapita per hari berdasarkan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*)

2.1.2 Teori Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif menggambarkan kondisi di mana seseorang memiliki tingkat pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata masyarakat di sekitarnya, yang menyebabkan keterbatasan dalam partisipasi sosial secara menyeluruh. Menurut Atkinson dan Bourguignon (2019), pendekatan kemiskinan relatif memperhatikan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan seseorang dinilai miskin apabila tidak dapat hidup sesuai standar umum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Model garis kemiskinan relatif dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$Z_r = \alpha \cdot \mu$$

Keterangan:

Z_r : garis kemiskinan relatif

μ : rata-rata pendapatan masyarakat

α : proporsi tertentu (biasanya 50% dari μ)

Pendekatan ini lebih menekankan aspek sosial dan budaya, seperti kesetaraan akses terhadap fasilitas umum, pendidikan dan peluang ekonomi. Konsep kemiskinan relatif banyak digunakan di negara-negara maju sebagai indikator eksklusi sosial dalam masyarakat

Kemiskinan merupakan permasalahan global yang telah mendapat perhatian serius selama bertahun-tahun. Menurut Bank Dunia, kemiskinan tidak hanya diukur dari kurangnya pendapatan, melainkan juga sebagai situasi seseorang atau sekelompok masyarakat gagal mengakses sumber daya penting untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (Hermawati, 2017). Kondisi menciptakan hambatan dalam pemenuhan hak dasar yang dimulai dari pangan, air bersih tempat tinggal pendidikan, hingga layanan kesehatan, sehingga banyak orang tidak bisa menikmati kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak mereka (Almazi dan Hermawati, 2018). Dengan demikian kemiskinan bukan semata soal pendapatan rendah, tetapi juga mencerminkan ketidakmampuan memanfaatkan berbagai peluang pembangunan yang tersedia bagi setiap individu (Rahman, 2019).

Menurut pandangan Arsyad yang dikutip oleh Baniadi (2018: 19-20), kemiskinan secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merujuk pada kondisi ketika pendapatan seseorang berada di bawah ambang batas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kebutuhan dasar tersebut mencakup aspek konsumsi individu serta akses terhadap layanan sosial yang esensial. Sementara itu, kemiskinan relatif tidak ditentukan oleh angka nominal tertentu, melainkan oleh perbandingan tingkat kesejahteraan seseorang dengan standar hidup yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, individu dapat dikategorikan miskin secara relatif apabila mereka berada dalam posisi secara ekonomi tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lain di sekitarnya.

Secara umum, terdapat beberapa indikator yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Salah satunya adalah pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar bagaimana dikemukakan oleh Arsyad (2016). Dalam pendekatan ini, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam mencukupi standar minimum kebutuhan dasar, baik yang bersifat konsumsi makanan maupun non-makanan. Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator utama yang digunakan adalah :

1. *Head Count Index* (HCI atau P0), yaitu persentase penduduk miskin yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan.
2. *Proverty Gap Indeks* (P1), yaitu menggambarkan rata-rata kesenjangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
3. *Proverty Severity Indeks* (P2), yaitu mengukur tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri. Nilai P0 yang rendah mencerminkan menurunnya proporsi penduduk miskin, sementara nilai P0 yang tinggi mengindikasikan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Sejak era kemerdekaan saat ini, kemiskinan telah diatasi melalui berbagai program di setiap periode pemerintahan terdapat dua kondisi yang menjadi penyebab kemiskinan; kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi karena keterbatasan sumber daya alam, rendahnya adopsi teknologi, serta dampak bencana alam. Sementara itu, kemiskinan buatan disebabkan oleh

rendahnya produktivitas masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga sulit untuk keluar dari lingkungan kemiskinan (Khouirus Sholihin, 2021).

Menurut BPS (2020), berdasarkan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) mendefinisikan kemiskinan yaitu situasi ketidakmampuan individu maupun kelompok dalam mencakupi kebutuhan dasar yang terdiri dari kebutuhan makanan dan *non* makanan dan dapat diukur melalui sisi pengeluaran. Priseptian dan Primandhana (2022) mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ialah pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup masyarakat pengangguran, serta upah minimum. Fadillah (2021) menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul di berbagai negara, baik maju maupun masih berkembang, dan biasanya dipicu oleh berbagai faktor yaitu :

1. Penghasilan yang rendah, membuat banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
2. Terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas, menutup peluang memperoleh pekerjaan layak, bahkan menurunkan prospek generasi berikutnya.
3. Tingginya biaya kesehatan atau minimnya layanan medis menjerumuskan individu ke beban finansial yang berat saat menghadapi masalah kesehatan.

Untuk menanggulangi persoalan ini, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan kebijakan sosial, peningkatan akses pendidikan, serta program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi (Maulidina *et al.* 2022). Berbagai

lembaga mulai dari organisasi internasional pemerintah dan menjalankan program pengurangan kemiskinan, seperti bantuan modal usaha dan subsidi pendidikan atau kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sihombing & Muslianti, 2022).

2.1.3 Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Kemajuan teknologi dipahami sebagai penerapan pengetahuan ilmiah mutakhir melalui beragam temuan dan inovasi yang meningkatkan baik modal fisik maupun kualitas sumber daya manusia. Salah satu kontribusi utama teknologi pada pertumbuhan ekonomi terletak pada sentral teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyediaan infrastruktur digital yang esensial. Maneejuk dan Yamaka (2020). Perkembangan sistem TIK memungkinkan percepatan aliran data, sehingga distribusi informasi menjadi lebih cepat dan menjangkau khalayak yang lebih cepat luas. Dengan keberadaan TIK masyarakat semakin mudah mengakses berbagai layanan dan sumber daya yang mendukung peningkatan kualitas hidup mereka (Yusa, 2016).

International Telecommunication Union (ITU) menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% pada teledensitas TIK berbanding lurus dengan kenaikan 3% dalam perekonomian suatu negara. Ngantono (2016) di Indonesia khususnya di daerah terpencil, TIK memegang peranan penting dalam memperlancar pertukaran dan penyebaran informasi yang mendukung proses pembangunan serta mengurangi ketinggalan wilayah tersebut dengan daerah lain. Kemajuan TIK diukur melalui indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK), sebuah

indikator yang mencerminkan tingkat perkembangan infrastruktur digital suatu wilayah.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut BPS (2021), dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Menurut pandangan teori Keynesian, permasalahan pengangguran terjadi sebagai dampak dari rendahnya permintaan agregat dalam perekonomian, yang pada akhirnya turut menekan laju pertumbuhan ekonomi Setyawan (2021). Dalam kerangka pemikiran Keynes, ketidakcukupan permintaan agregat menjadi penyebab munculnya pengangguran di suatu negara.

Putri (2023) mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator makroekonomi, khususnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Asing (PMA), serta perkembangan teknologi. Temuan mereka menunjukkan bahwa peningkatan PDRB dan PMA berkontribusi pada penurunan TPT, yang mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat mampu menciptakan lebih banyak peluang bagi masyarakat secara efisien.

Di sisi lain, aspek demografis juga berperan dalam mempengaruhi dinamika pengangguran. Salsabella (2018), menekankan bahwa jumlah penduduk dan jenjang pendidikan merupakan determinan signifikan terhadap TPT. Apabila

pertumbuhan jumlah penduduk tidak diiringi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai, maka tekanan terhadap pasar tenaga kerja akan, yang pada akhirnya mendorong naiknya angka pengangguran.

2.1.5 Pendidikan

Menurut Ihsan (2011), jenjang pendidikan merupakan proses pendidikan yang berlangsung secara berkesinambungan, yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, kompleksitas materi pembelajaran, serta metode penyampaianya. Jenjang pendidikan di sekolah meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Menurut Tirtarahardja dan Solo (dalam daniel 2020), Pendidikan mendefinisikan sebagai persiapan untuk bekerja sebagai kegiatan untuk memimpin siswa, dan mereka memiliki tekad mendasar untuk melakukan pekerjaan mereka.

Menurut Basyit (2020), tingkat pendidikan berada pada tahap pendidikan yang ditentukan berdasarkan tingkat pengembangan siswa, tujuan yang harus dicapai dan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan melalui jalur pendidikan. Badan Pusat Statistik (2021) mendefinisikan rata-rata lama sekolah sebagai tahun dan dihabiskan untuk pelatihan formal. Cakupan usia yang dihitung rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 25 tahun keatas. Menurut Todaro (2000), pendidikan dikatakan sebagai tujuan pembangunan dasar. Pendidikan mana yang memainkan peran penting dalam dan merancang kemampuan negara untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kemampuannya untuk menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian untuk mengetahui bagaimana permasalahan kemiskinan telah banyak dilakukan. Berbagai alat ukur dan teori yang mengungkapkan bahwa kemiskinan diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti teknologi, informasi dan komunikasi, tingkat pengangguran, dan pendidikan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

Khoirunnisa dan Budiarti (2020), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Teknologi Informasi dan komunikasi Terhadap Tingkat Kemiskinan tahun 2012-2017”. Dengan menggunakan Data Panel dengan jenis data *Random Effect Model* (REM), yang menunjukkan hasil bahwa IP-TIK, PDRB per kapita, Infrastruktur listrik berhubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dari hasil penelitian, di dapat bahwa Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sehingga perlu adanya peningkatan baik dari segi infrastruktur fisik dan telekomunikasi maupun penggunaan TIK serta dilakukan upaya penyuluhan literasi bagi masyarakat miskin agar mau dan mampu memanfaatkan TIK sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

Netri *et al.* (2023), melakukan penelitian yang berjudul “Tingkat Pengangguran, Upah dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mangondoow Tahun 2009-2021”. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data (BPS). Data diolah menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan program Eviews8. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mangondow. Upah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mangondow. Tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mangondow. Secara simultan Tingkat Pengangguran Upah, dan Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mangondow.

Mouren *et al.* (2022), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Kabupaten Toraja Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap pengangguran di Kabupaten Toraja Utara. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Setelah melakukan uji analisis maka dapat diketahui hasil penelitian tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Toraja Utara tahun 2010-2021, sedangkan untuk jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Toraja Utara. Secara simultan tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Toraja Utara tahun 2010-2021.

Darmawanto (2023), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan”. Menurut Darmawanto (2023) metode penelitian ini

menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2014-2022. Analisis yang digunakan menggunakan data panel. Dimana hasil analisisnya, Produk Domestik regional Bruto (PDRB) pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan.

Ishak *et al.* (2024), melakukan penelitian yang berjudul “Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Kemiskinan Indonesia”. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi spasial data panel, dimana hasil penelitian menemukan bahwa terdapat efek spasial pada kemiskinan di Indonesia. variabel Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK), persentase pengguna telepon seluler dan indeks pembangunan manusia (IPM) signifikan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, sebaliknya, angka buta huruf dan tingkat pengangguran terbuka signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, selain dari sisi sosial ekonomi perlu juga meningkatkan TIK sebagai bagian penting dari strategi pembangunan yang lebih luas untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.